



Jurnal Ilmiah Akuntansi, Keuangan dan Bisnis (JIKABI)

Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Pendapatan Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo

The Influence of the Use of Regional Management Information Information System (SIMDA) Information Technology on the Information Value of Gorontalo City Government Financial Statements

Mattoasi, Didiet Pratama Musue, & Winra Gita Abas

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan teknologi informasi berdasarkan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) Pendapatan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan Pemerintah Kota Gorontalo. Di dalam menjawab hipotesis penelitian maka digunakan metode penelitian kuantitatif melalui penyebaran kuesioner kepada 58 responden (pegawai) pada Badan Keuangan Daerah Kota Gorontalo. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan SPSS 22 for windows. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi (SIMDA) Pendapatan berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan Pemerintah Kota Gorontalo sebesar 57.3% sedangkan sisanya sebesar 42.7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Keywords: Teknologi Informasi, Sistem Informasi Manajemen Daerah; Nilai Informasi Pelaporan Keuangan; Pemerintah Kota Gorontalo.

Abstract

This study aims to see the influence of information technology based on regional management information system (SIMDA) revenue on the value of financial reporting information of the Gorontalo City Government. In answering the research hypothesis, quantitative research methods are used through distributing questionnaires to 58 respondents (employees) at the regional finance agency of Gorontalo City. The data obtained were analyzed using SPSS 22 for windows. Based on the research results, it shows that the use of information technology (SIMDA) income affects the value of financial reporting information of the Gorontalo City Government by 57.3%, while the remaining 42.7% is explained by other variables not examined in this study.

Keywords: Information Technology, regional management information systems; Value of Financial Reporting Information; Gorontalo City Government.

How to Cite: Mattoasi, Musue, D. P. & Abas, W. G. (2023). Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Pendapatan Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Keuangan dan Bisnis (JIKABI)*, 2(1) 2023: 1-7,

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Nilai informasi yang disajikan pada laporan keuangan diharapkan dapat digunakan oleh semua pihak di dalam pengambilan keputusan baik oleh pihak internal maupun dengan pihak eksternal. Konsep perhatian ini menurut Horton; Serafeim dan Serafeim (2013) sangat penting dengan memperhatikan kualitas informasi yang relevan dan andal. Selain itu asimetri informasi harus diminimalisir karena menurut Langgeng (2020) serta Franklin dan Elvis (2020) mempunyai dampak terhadap keputusan organisasi. Penyajian laporan keuangan yang di dalamnya mengandung nilai kualitas informasi yang mempunyai kualitas primer dan kualitas sekunder dipastikan bahwa keuangan yang dilaporkan dapat dipercaya dan sesuai dengan kejadian atau transaksi dalam organisasi. Oleh karena itu menurut Shroff (2017) dan Zuca (2009) informasi yang berkualitas disajikan dalam laporan keuangan harus kredibel sehingga bebas dari kesalahan dan subjektivitas serta dapat menghilangkan keraguan dalam pengambilan keputusan baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang dan dapat mengoreksi setiap kesalahan masa yang lalu.

Berdasarkan pentingnya nilai informasi dalam suatu laporan keuangan menjadi keharusan bagi perusahaan, maka informasi yang disajikan lebih relevan; andal; dapat dibandingkan serta dapat dipahami dan lengkap, sehingga kualitas laporan keuangan mempunyai mamfaat yang lebih nyata (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Keadaan ini berbeda dengan nilai laporan keuangan yang telah dilaporkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo dan telah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) bahwa opini yang diperoleh wajar tanpa pengecualian tidak menjamin kualitas informasi keuangan, karena nilai informasi yang sajikan belum maksimal karena masih ditemukan beberapa permasalahan yaitu pemungutan restribusi tanpa Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan penggunaan langsung hasil pungutan serta terdapat potensi pendapatan yang tidak dipungut (BPKP, 2020).

Berkaitan dengan fenomena yang telah dikemukakan menunjukkan bahwa kondisi tersebut belum sesuai dengan harapan masyarakat dan pemerintah dan juga sejalan dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya. Ariska, Masniadi, dan Rachman (2019) menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang digunakan oleh pemerintah selama satu periode dan diwajibkan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang sesuai. Demikian juga hasil penelitian Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) bahwa banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dari laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

Begitu pentingnya nilai informasi dari laporan keuangan pemerintah dalam pengambilan keputusan, maka beberapa hasil penelitian juga menghendaki bahwa penyajian informasi akuntansi yang selama ini diproses dengan sistem manual, maka penting diproses dengan memanfaatkan teknologi informasi yang baik sehingga diharapkan menjawab suatu fenomena seperti dalam penelitian ini. Widjajanto (2013) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang baik, diharapkan dapat menghasilkan pelaporan keuangan yang andal dan tepat waktu, sehingga keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan juga dapat meningkat. Sebelumnya hasil penelitian Hamzah (2010) dan Suwanda (2015) bahwa pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

Berdasarkan beberapa uraian yang telah dikemukakan memberi informasi bahwa penggunaan sistem informasi berbasis teknologi seperti Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dapat memudahkan para pemakai internal dan eksternal organisasi. Kesimpulan ini juga sejalan dengan Dian (2013) bahwa pemanfaatan teknologi informasi seperti SIMDA merupakan salah satu upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat, lengkap, akurat, dan terpadu, untuk menunjang proses administrasi pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan memfasilitasi partisipasi dan dialog publik dalam perumusan kebijakan. Demikian juga hasil penelitian Ariska, Masniadi, Rachman (2019); Dewi dan Senggarang (2014) yang menyatakan bahwa variabel Penerapan SIMDA berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan teknologi dengan menggunakan beberapa software termasuk SIMDA diharapkan dapat menghasilkan informasi yang berkualitas sehingga dapat diandalkan. Namun demikian masih ditemukan penelitian

sebelumnya seperti penelitian Muda, Wardani, Erlina, Maksum, Lubis, Bukit & Abubakar (2017) dan Pelamonia (2021) menyatakan bahwa Pemanfaatan teknologi informasi akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berkaitan dengan penerapan teknologi informasi dalam menghasilkan nilai informasi laporan keuangan. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teori keagenan seperti yang dipopulerkan oleh Jensen dan Meckling tahun 1976 serta didukung oleh Lane (2000) teori yang menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen. Lane (2000) menyatakan bahwa hubungan prinsipal agen merupakan suatu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen-komitmen kebijakan publik, termasuk adanya tindakan pemerintah untuk menghasilkan nilai informasi laporan keuangan. Beberapa penelitian yang sejenis telah dilakukan juga merujuk kepada teori keagenan seperti Setiawan (2012) yang menyatakan bahwa semakin baik akuntabilitas suatu pemerintahan daerah berarti semakin sedikit terjadinya permasalahan information asymmetry dan semakin sedikit peluang terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh pihak pemerintah daerah sebagai bentuk kualitas informasi dari laporan keuangan.

Menurut Wahyono dalam Dewi, Cipta dan Bagia (2014) bahwa dalam menghasilkan suatu informasi yang bernilai (dapat dipahami) disini menyangkut dua elemen pokok, yaitu informasi yang dihasilkan dan sumber daya yang menghasilkan. Menyangkut informasi yang dihasilkan, maka informasi laporan keuangan tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak terlalu rumit bagi pemakai dan bernilai, dengan tidak menggunakan istilah-istilah yang kabur serta menggunakan klasifikasi peraturan yang lazim atau berlaku. Manfaat dan tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah dapat dipenuhi maka informasi yang disajikan harus merupakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Informasi harus bermanfaat bagi para pemakai sama saja dengan mengatakan bahwa informasi harus mempunyai nilai. Nilai informasi laporan keuangan pemerintah merupakan laporan keuangan yang memiliki informasi yang bermanfaat bagi pemakai untuk pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

Secara umum manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan membantu dalam penyiapan laporan. Selain itu dapat menyimpan data dalam jumlah besar, meminimalisir terjadinya kesalahan, dan biaya pemrosesan yang lebih rendah. Pemanfaatan teknologi informasi yang baik, diharapkan dapat menghasilkan pelaporan keuangan yang andal dan tepat waktu, sehingga keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan juga dapat meningkat (Widjajanto dalam Sembiring, 2013).

Melihat fenomena, teori, dan kerangka konseptual yang telah disajikan maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H1 : Penggunaan teknologi informasi (SIMDA) pendapatan berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan Pemerintah Kota Gorontalo.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis Kuantitatif (Creswell, 2016; Sugiono, 2018). Desain penelitian merupakan model atau metode yang digunakan peneliti untuk melakukan suatu penelitian yang memberikan arah terhadap jalannya penelitian.

Desain penelitian ditetapkan berdasarkan tujuan dan hipotesis penelitian (Creswell, 2016; Sugiono, 2018). Dari penjelasan sebelumnya dapat digambarkan desain penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1
Desain Penelitian



Hasil Penelitian

Tabel 1.1 Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.421	4.982		3.16	0.002
	SIMDA Pendapatan	0.695	0.155	0.424	4.493	0.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber data diolah 2021, IBM SPSS versi 22

Dalam penelitian ini menggunakan 58 responden dan dari hasil analisis pada tabel 1.1 pada kolom Unstandardized Coefficients (B), tertera nilai constant B sebesar 1.421, koefisien Simda Pendapatan (X) sebesar 0.695, Dengan demikian dapat ditulis persamaan analisis regresi linear sederhana dalam penelitian ini adalah:

$$Y = 1.421 + 0.695 X + e$$

Maknanya bahwa konstanta sebesar 1.421 menjelaskan bahwa jika SIMDA Pendapatan bernilai Nol maka Nilai informasi keuangan adalah sebesar 1.421 satuan. Koefisien regresi untuk variabel SIMDA Pendapatan (X) sebesar 0.695 artinya jika variabel SIMDA Pendapatani (X) ditingkatkan sebesar 1% maka akan menyebabkan meningkatnya Nilai informasi Keuangan di Kota Gorontalo sebesar 69.5%.

Kemudian berdasarkan uji t Hasil analisis uji t untuk variabel tingkat pemahaman akuntansi (X) yang diukur diperoleh nilai t hitung sebesar 4.493 > t tabel 2.0006 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penggunaan Teknologi Informasi (SIMDA Pendapatan) berpengaruh positif terhadap Nilai informasi Keuangan di Kota Gorontalo sehingga Hipotesis Ho diterima

Tabel 1.2 Hasil uji R

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.733 ^a	0.573	0.502	3.57041

a. Predictors: (Constant), X
b. Dependent Variable: Y

Sumber data diolah 2021, IBM SPSS 22

Berdasarkan output yang tertera pada tabel 1.2 diketahui nilai R square sebesar 0.573. Nilai ini mengandung arti bahwa variabel Penggunaan teknologi informasi mempengaruhi Nilai informasi Keuangan sebesar 57.3% sedangkan 42.7% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang ada dalam struktur teori namun tidak diuji dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari pengolahan data SPSS dan juga penelitian-penelitian terdahulu maka diperoleh pembahasan sebagai berikut:

Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh BPK. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, laporan keuangan setiap pemerintah daerah setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas

Laporan Keuangan. Pelaporan keuangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertanggungjawaban kepala daerah kepada masyarakat (public accountability).

Hasil analisis deskriptif mengenai kualitas laporan keuangan menunjukkan bahwa secara keseluruhan persentase skor capaian untuk variabel Nilai informasi pelaporan keuangan adalah sebesar 88,38% yang berada pada kategori yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Gorontalo mampu untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas yang selama ini dibuktikan dengan adanya capaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari pemerintah Kota Gorontalo. Laporan keuangan yang berkualitas menjadi suatu prestasi bahwa pemerintah Kota Gorontalo telah efektif dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang telah diamanatkan dalam undang-undang pengelolaan keuangan daerah dan otonomi daerah di Republik Indonesia.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah pada akhirnya akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan, sebagaimana yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai (Sukmaningrum, 2012). Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (Armando, 2013). Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan dan penciptaan laporan keuangan yang berkualitas yakni penggunaan teknologi informasi. Sistem Informasi Keuangan Daerah disingkat SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Informasi keuangan daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) merupakan sebuah sistem pengelolaan keuangan dengan menggunakan teknologi informasi yang dapat membantu pemerintah dalam menghasilkan informasi yang cepat dan tepat. Anwar (2014) mengemukakan bahwa sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) adalah sistem manajemen informasi pemerintah daerah yang merupakan subsistem dari Sistem Informasi Manajemen Dalam Negeri (SIMDAGRI) yang mendukung kebutuhan informasi bagi penyelenggaraan fungsi utama dan penunjang bagi pemerintah daerah yang terintegrasi secara baik.

Hasil analisis deskriptif mengenai kualitas penggunaan teknologi informasi menunjukkan bahwa variabel Teknologi informasi (SIMDA pendapatan) adalah sebesar 85,69% yang berada pada kategori yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Teknologi informasi (SIMDA pendapatan) pada Pemerintah Kota Gorontalo sudah berjalan optimal meskipun target dalam pendapatan asli daerah belum tercapai dengan sempurna. Pemetaan pendapatan dan potensi pendapatan dengan menggunakan aplikasi ini akan lebih memberikan manfaat bahwa pendapatan itu bisa sesuai dengan target yang ditetapkan pemerintah.

Dewi (2014) mengemukakan bahwa definisi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) merupakan sebuah sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi yang dapat membantu pemerintah daerah dalam menghasilkan informasi keuangan yang relevan, cepat, akurat, lengkap dan dapat diuji kebenarannya. Aplikasi SIMDA juga dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangannya lainnya secara lebih komprehensif yang meliputi informasi mengenai posisi keuangan daerah, kondisi kinerja keuangan dan akuntabilitas pemerintah daerah yang dalam hal ini penggunaan SIMDA mampu menghasilkan nilai informasi pelaporan keuangan yang efektif.

Hal ini sebagaimana hasil pengujian regresi ditemukan bahwa Teknologi informasi (SIMDA pendapatan) berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada Pemerintah Kota Gorontalo dengan nilai koefisien determinasi sebesar 57,3%. Sedangkan sisanya sebesar 42,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti variabel partisipasi anggaran, pengawasan fungsional, sistem pengendalian intern, komitmen organisasional, kompetensi SDM dan kapasitas organisasi. Kemudian secara parsial ditemukan bahwa teknologi Teknologi informasi (SIMDA pendapatan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada Pemerintah Kota Gorontalo Hasil koefisien positif menunjukkan bahwa semakin efektif penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan maka akan semakin baik pula nilai informasi pelaporan keuangan pada Pemerintah Kota Gorontalo. Hasil ini sesuai dengan teori Agency bahwa Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai agents bagi masyarakat (principal) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat. Dengan demikian berarti pengelolaan pemerintah daerah harus akuntabel dan diawasi (checks and balances) untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Semakin baik akuntabilitas suatu pemerintahan daerah berarti semakin sedikit terjadinya permasalahan information asymmetry dan semakin sedikit peluang terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh pihak pemerintah daerah (agent), Setiawan (2012).

Hasil penelitian ini secara keseluruhan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hamzah dalam Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) bahwa pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan pemanfaatan teknologi informasi akan mempermudah akses dan juga bermanfaat bagi nilai informasi laporan keuangan pada Pemerintah Daerah. Pemanfaatan teknologi informasi atau dalam Pemerintahan lebih dikenal dengan SIMDA. Ketika komputer dan komponen-komponen yang berhubungan dengan teknologi informasi diintegrasikan ke dalam suatu sistem informasi akuntansi, tidak ada aktivitas umum yang ditambah atau dikurangi. Sistem informasi akuntansi masih mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Sistem masih memasukkan pengendalian-pengendalian atas keakurasian data. Sistem juga menghasilkan laporan-laporan dan informasi lainnya.

SIMPULAN

Teknologi informasi (SIMDA pendapatan) berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada Pemerintah Kota Gorontalo dengan nilai koefisien determinasi sebesar 57,3%. Sedangkan sisanya sebesar 42,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti variabel partisipasi anggaran, pengawasan fungsional, sistem pengendalian intern, komitmen organisasional, kompetensi SDM dan kapasitas organisasi. Kemudian (SIMDA pendapatan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada Pemerintah Kota Gorontalo Hasil koefisien positif menunjukkan bahwa semakin efektif penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan maka akan semakin baik pula nilai informasi pelaporan keuangan pada Pemerintah Kota Gorontalo.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. Khoirul dan Oetojo S, Asianti. 2004. Aplikasi sistem informasi manajemen bagi pemerintahan di era otonomi daerah SIMDA. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ariska, C., Masniadi, R., & Rachman, R. (2019). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Riset Kajian Teknologi dan Lingkungan*, 2(1), 15-23.
- Armando, G. (2013). Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan Pemerintah di Kota Bukittinggi", *Artikel, Universitas Negeri Padang*.
- Dewi, A. K., & Senggarang, J. P. (2014). Pengaruh kualitas sistem informasi aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah) terhadap kepuasan pengguna akhir. *Studi kasus pada pemerintahan provinsi kepulauan riau*.

- Dewi, Cipta dan Bagia. (2014). Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). *Jurnal e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen (Volume 2 Tahun 2014)*. Diponegoro. Semarang.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 33 Tahun 2019 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).
- Lane, Jan-Erik. (2000). *The public sector-concepts, models and approaches*. London: SAGE Publications.
- Muda, I., Wardani, D. Y., Maksum, A., Lubis, A. F., Bukit, R., & Abubakar, E. (2017). The influence of human resources competency and the use of information technology on the quality of local government financial report with regional accounting system as an intervening. *Journal of Theoretical & Applied Information Technology*, 95(20).
- Pelamonia, J. T. (2021). Pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi terhadap etepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah: studi empiris di pemerintah provinsi maluku. *Jurnal ekonomi, sosial & humaniora*, 2(06), 39-52.
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun (2005) Tentang standar akuntansi pemerintahan, kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1, paragraph 9,
- Sembiring, Febriady Leonard. (2013). Pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Padang). *Artikel Skripsi*. Universitas Negeri Padang, Padang.
- Setiawan, Wahyu. 2012. Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia. *Skripsi Sarjana*. Universitas Diponegoro.
- Sukmaningrum, Tantriani, 2012. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota Semarang). *Skripsi*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Winidyaningrum dan Rachmawati. (2010). Pengaruh sumber daya manusia dan pemanfaatan TI terhadap keterandalan Dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening pengendalian intern akuntansi (Studi Empiris di Pemda Subosukawonosraten). *Jurnal SNA Purwokerto* 2010.